
Perancangan Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Ajeng Pertiwi*, Vita Citra Mulyandini

Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: ajengkeuangandinkes@gmail.com*

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan proses pencatatan manual yang masih digunakan saat ini, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan dan proses monitoring anggaran. Menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dan pendekatan Agile, penelitian ini merancang sistem berbasis web yang dapat memproses data anggaran secara otomatis, memudahkan pengelola keuangan dalam menyusun laporan secara tepat waktu, dan memastikan keterkaitan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan serta mempermudah laporan yang dibutuhkan untuk keperluan pertanggungjawaban dan pemeriksaan.

Kata kunci: Sistem Informasi; Realisasi Anggaran; Dinas Kesehatan; SDLC; Transparansi.

Abstract:

The rapid development of Information Technology has had a significant impact on various aspects of life, including in government administration. This study aims to design a budget realization information system at the West Java provincial Health Office that can improve efficiency, transparency, and accuracy in regional financial management. This system is expected to replace the manual recording process that is still used today, which can affect the quality of reports and budget monitoring processes. Using the System Development Life Cycle (SDLC) method and Agile approach, this study designed a web-based system that can process Budget data automatically, make it easier for financial managers to prepare reports in a timely manner, and ensure the linkage between planned budgets and budget realization. The results of this study are expected to contribute to the West Java provincial Health Office in improving accountability and financial transparency as well as facilitating the reports needed for accountability and examination purposes.

Keywords: Information System; Budget Realization; Health Office; SDLC; Transparency.

PENDAHULUAN

Transformasi digital sektor publik telah menjadi agenda global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien (Ma'sum et al., 2025; Prastowo & Saputro, 2025; Ramadhany et al., 2025; Suriadi, 2025; Wahyiah, 2025). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022) dalam laporannya menyatakan bahwa adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan, pencegahan korupsi, dan optimalisasi alokasi sumber daya. Namun, studi yang dilakukan oleh World Bank (2023) mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang masih menghadapi kesenjangan digital dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan. Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (Cholik, 2021; Segara & Nasution, 2025; Setiawan, 2018; Wijaya & Saleh, 2025). Saat ini, pemerintah dituntut memiliki sistem informasi yang andal dan terintegrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap proses keuangan dapat dipantau secara real-time, sehingga dapat meminimalkan risiko penyimpangan serta mempercepat proses pengambilan Keputusan (Agma, 2025; Purwono, 2025; Syahfina & Nasution, 2025). Hal tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, di mana pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keseluruhan proses tersebut melibatkan pengelolaan informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen keuangan secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tertib administrasi keuangan daerah (Abdullah, 2023; Kusumaningrum et al., 2024; Samosir et al., 2022; Siregar, 2025). Keduanya bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan penggunaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berperan penting dalam proses penatausahaan keuangan daerah (Darmansyah et al., 2025; Kusumaningrum et al., 2024; Najoran et al., 2025; Simbolon, 2022). Keduanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Keberadaan keduanya menjadi ujung tombak dalam satuan kerja, khususnya dalam meneliti kelengkapan tagihan, melakukan pengujian dokumen, hingga melaksanakan pembayaran belanja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran beserta bukti transaksinya, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran, serta memastikan ketersediaan dana yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2009) Realisasi anggaran merupakan implementasi dari rencana keuangan yang menunjukkan komitmen dan penggunaan dana oleh pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan tingkat kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi anggaran dapat diukur dengan membandingkan antara rencana anggaran dengan hasil aktual yang telah dilaksanakan. Proses realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan usulan realisasi belanja dalam bentuk Nota

Pencairan Dana (NPD) dilengkapi dengan bukti transaksi pendukung. Usulan tersebut selanjutnya harus memperoleh persetujuan dari Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), kemudian dilakukan proses verifikasi oleh Verifikator. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai oleh Verifikator, berkas diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diproses pencairan dananya. Seluruh rangkaian proses tersebut kemudian disajikan dalam bentuk informasi dan laporan keuangan yang menggambarkan keterkaitan antara anggaran yang direncanakan, realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, serta sisa pagu anggaran yang masih tersedia.

Saat ini, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sarana pendukung dalam penatausahaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mampu menyajikan data realisasi belanja secara rinci hingga tingkat komponen belanja, baik berdasarkan aktivitas dan sumber dana, secara otomatis. Oleh karena itu, pengelolaan data realisasi belanja masih didampingi dengan pencatatan manual sebagai alat bantu dalam menyempurnakan penyusunan laporan realisasi belanja.

Pencatatan manual tersebut dilakukan dengan menggunakan **Microsoft Excel** dengan format laporan yang berbeda-beda antar Bendahara Pengeluaran Pembantu, bahkan sebagian masih dilakukan melalui pencatatan di buku tulis. Metode pencatatan manual ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain proses perhitungan realisasi belanja hingga rincian komponen belanja memerlukan waktu relatif lama karena harus dilakukan perhitungan secara manual serta memiliki risiko kehilangan data. Selain itu, proses perhitungan dilakukan dengan menyalin ulang data dari arsip setiap periode, sehingga menyebabkan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi lambat dan kurang efisien. Padahal, setiap tahun Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diminta data laporan realisasi belanja berdasarkan aktivitas dan sumber dana atas permintaan berbagai lembaga pemeriksa, seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Indira dan Neneng (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih belum optimal, terutama dalam hal kualitas informasi dan kualitas sistem.

Laporan realisasi belanja terinci sampai dengan komponen belanja juga memiliki peran penting pada tahap sebelum pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, Bendahara Pengeluaran Pembantu perlu memeriksa ketersediaan dana untuk setiap aktivitas dan komponen terkait sebelum melakukan pembayaran, guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia mencukupi dan tidak melampaui pagu yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada perancangan sistem informasi realisasi anggaran melalui website diantaranya :

Indira Septiani dan Neneng Weti Isnawaty (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat” mengatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun SIPD telah mendukung pengelolaan data secara terorganisir dengan aksesibilitas yang baik, penggunaan SIPD masih belum optimal, terutama pada dimensi kualitas Informasi dan kualitas sistem.

Fahmi Lutfi, Amar P. Natasuwarna, dan Herry Surya Kasimo (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Desa Baning Berbasis Website” mengatakan bahwa perancangan sistem informasi realisasi anggaran dana ini memudahkan masyarakat ketika ingin mengetahui informasi seputar Desa Baning baik tentang perencanaan maupun realisasi anggaran dana desa. Website yang dibuat untuk seorang admin atau staff desa sangat memudahkan untuk mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi dana desa serta menerima umpan balik dari masyarakat Desa.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi realisasi anggaran berbasis website mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, penulis berinisiatif untuk mengembangkan sistem serupa yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam menyajikan data rincian realisasi belanja secara terintegrasi dan real-time.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses realisasi anggaran belanja. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul : “Perancangan Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perancangan sistem informasi realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi yang dapat mempermudah pengelolaan anggaran belanja dengan cara yang lebih efisien dan akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan guna meningkatkan kreativitas penulis, khususnya dalam pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi realisasi anggaran belanja yang terintegrasi, yang dapat meminimalisir risiko kehilangan data serta mempermudah pengelola keuangan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini juga akan mampu menyajikan informasi anggaran dan sisa anggaran secara rinci hingga komponen belanja, serta dilengkapi dengan fitur cetak laporan berdasarkan periode waktu yang diinginkan.

Hasil dari penelitian perancangan sistem informasi realisasi anggaran belanja ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perancangan sistem informasi realisasi anggaran belanja, serta menjadi referensi bagi

penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang Sistem Informasi Akuntansi, khususnya dalam konteks perancangan sistem informasi. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran dan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Sedangkan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pustaka bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik untuk mengembangkan sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi pengelolaan anggaran belanja.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis yang Digunakan

Teknik analisis yang digunakan mengacu pada kerangka kerja *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan metode Agile. SDLC dipilih sebagai panduan utama karena menyediakan tahapan sistematis dalam pengembangan sistem, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga implementasi. Sementara itu, metode Agile digunakan sebagai pendekatan pengembangan yang lebih fleksibel dan iterative, sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna secara cepat dan efisien. Tahapan-tahapan SDLC yang digunakan meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan organisasi terkait pengelolaan realisasi anggaran belanja. Kegiatan dalam tahap ini meliputi analisis permasalahan yang ada, penentuan tujuan sistem, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta penetapan ruang lingkup sistem yang akan dibangun.

2. Analisis (*Analysis*)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis data guna menggali kebutuhan sistem secara mendalam. Teknik yang digunakan mencakup observasi langsung terhadap proses kerja, wawancara dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta studi literatur terkait regulasi dan kebijakan keuangan. Tujuannya adalah untuk memahami alur proses belanja, pelaporan anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data realisasi anggaran.

3. Perancangan (*Design*)

Tahap ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan mencakup desain antarmuka (*user interface*), struktur database, dan alur proses sistem. Tools yang digunakan dalam tahap ini antara lain Diagram Konteks dan Dekomposisi untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap sistem, Data Flow Diagram (DFD) untuk menggambarkan aliran data dalam sistem dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data.

4. Penerapan (*Implementation*)

Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang mulai dikembangkan dan diimplementasikan dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Jika

ditemukan kekurangan atau kesalahan, dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Tahap ini juga mencakup pelatihan pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik

5. Pemeliharaan (Maintenance)

Setelah sistem digunakan secara aktif, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal. Kegiatan meliputi perbaikan *error* yang ditemukan, peningkatan keamanan sistem, serta penambahan fitur atau penyempurnaan fungsi berdasarkan umpan balik dari pengguna. Tahap ini bersifat berkelanjutan untuk menjamin sistem tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

Kombinasi antara SDLC dan metode Agile dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang terstruktur, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, khususnya dalam pelaporan realisasi anggaran belanja yang sering mengalami penyesuaian dinamis di instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Sistem Usulan

Peneliti memilih metode *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagai pendekatan dalam pelaksanaan penelitian. Metode SDLC digunakan sebagai panduan utama karena menyediakan tahapan pengembangan sistem yang sistematis, mulai dari proses identifikasi kebutuhan hingga tahap implementasi sistem. Adapun model SDLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agile. Metode agile dipilih karena merupakan pendekatan pengembangan yang bersifat fleksibel dan iterative, sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna secara cepat dan efisien.

Tahapan SDLC yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan organisasi dalam pengelolaan realisasi anggaran belanja. Kegiatan pada tahap ini meliputi analisis terhadap permasalahan yang ada, penentuan tujuan pengembangan sistem, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta penetapan ruang lingkup sistem yang akan dibangun.

2. Analisis (*Analysis*)

Tahap analisis dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menggali kebutuhan sistem secara mendalam. Teknik yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap proses kerja yang berjalan, serta studi literatur yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan keuangan. Tahap ini bertujuan untuk memahami alur proses belanja, mekanisme pelaporan anggaran serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data realisasi anggaran.

3. Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan sistem meliputi desain antarmuka (*user interface*), perancangan struktur basis data, serta perancangan alur proses sistem. Adapun alat bantu (*tools*) yang digunakan pada tahap ini antara lain Diagram Konteks dan Diagram Dekomposisi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem, *Data Flow Diagram* (DFD) untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, serta *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan hubungan antarentitas dalam basis data.

4. Penerapan (*Implementation*)

Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang mulai dikembangkan dan diimplementasikan pada lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan, dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap sistem. Selain itu, tahap ini juga mencakup kegiatan pelatihan pengguna agar sistem dapat dioperasikan secara optimal.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah sistem digunakan secara aktif, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan secara optimal. Kegiatan pada tahap ini meliputi perbaikan kesalahan (*error*) yang ditemukan, peningkatan keamanan sistem, serta penambahan fitur atau penyempurnaan fungsi berdasarkan umpan balik dari pengguna. Tahap pemeliharaan bersifat berkelanjutan guna menjamin sistem tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Prosedur sistem yang diusulkan merupakan rangkaian proses perancangan sistem yang dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi. Sistem yang diusulkan dirancang sebagai penyempurnaan dari sistem yang berjalan saat ini. Perbedaan utama antara sistem lama dan sistem baru terletak pada penyajian informasi laporan realisasi belanja yang disajikan secara lebih rinci hingga ke tingkat komponen, serta disusun secara tepat dan akurat. Dengan demikian, sistem yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja bagian keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun prosedur sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Input

Rancangan sistem yang diusulkan dirancang dengan konsep yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses serta memanfaatkan informasi yang tersedia dalam sistem.

2. Proses

Pada sistem yang diusulkan, seluruh proses pengolahan data dilakukan secara terkomputerisasi guna meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam pengelolaan data.

3. Output

Sistem yang diusulkan menghasilkan keluaran berupa formulir realisasi belanja dan laporan realisasi belanja yang disusun secara terkomputerisasi. Dengan penerapan sistem ini, formulir realisasi belanja dan laporan realisasi belanja dapat disajikan secara lebih terinci hingga ke tingkat komponen belanja. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah proses penyusunan laporan realisasi belanja yang rinci ketika diperlukan untuk keperluan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

Proses prosedur yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengolahan Data

- a. Bagian Admin, yaitu yaitu Bendahara Pengeluaran, bertugas membuat dan mengelola data pengguna (*user*) yang kemudian disimpan ke dalam basis data pengguna.
- b. Selain itu, Bagian Admin juga bertanggung jawab untuk mengunggah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke dalam sistem.

2. Proses Login
 - a. Pengguna (user) terlebih dahulu melakukan proses login dengan mengakses sistem menggunakan email masing-masing yang telah terdaftar.
3. Proses Penginputan Realisasi Belanja

Proses ini dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). PPTK melakukan penginputan rencana realisasi belanja ke dalam sistem dengan tahapan sebagai berikut :

 - a. Menginput data Program sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - b. Menginput data Kegiatan yang terkait dengan program yang dipilih.
 - c. Menginput data Subkegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan.
 - d. Menginput Nama Akun Belanja yang digunakan dalam rencana realisasi belanja.
 - e. Menginput Kelompok Belanja / Tagging sesuai dengan kalsifikasi belanja yang berlaku.
 - f. Menginput keterangan Keterangan Belanja atau Aktivitas sebagai penjelasan atas penggunaan anggaran
 - g. Menginput nominal rencana realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
 - h. Menginput uraian tujuan pembayaran sebagai dasar dan alasan dilakukannya pengeluaran anggaran
 - i. Setelah seluruh data diinput secara lengkap dan benar, PPTK melakukan penyimpanan data ke dalam sistem
 - j. Setelah proses penginputan selesai, PPTK mencetak Formulir Realisasi Belanja sebagai dokumen pendukung dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.
4. Proses Persetujuan

Proses ini dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap berkas Formulir Realisasi Belanja yang diajukan oleh PPTK dengan membandingkan data pada sistem dengan dokumen pendukung yang disertakan. Apabila data yang diajukan telah sesuai, Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan persetujuan dengan memilih menu Disetujui pada sistem. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menolak pengajuan dengan memilih menu Ditolak,
5. Proses Laporan

Para pengguna dapat mengakses menu permintaan laporan melalui sistem untuk melihat dan mengajukan permintaan laporan yang dibutuhkan. Melalui menu tersebut, pengguna dapat memilih jenis laporan, periode waktu, serta rincian data yang diinginkan. Selanjutnya, sistem akan memproses permintaan dan menampilkan atau menyediakan file laporan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

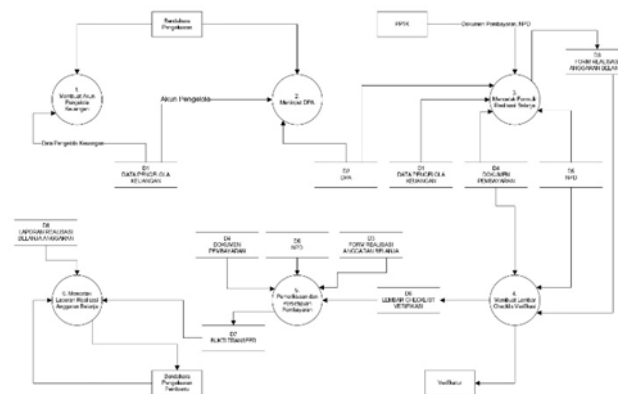
Diagram Alir Data Sistem Usulan

Diagram Konteks

Diagram dekomposisi menggambarkan pemecahan proses utama dalam sistem menjadi beberapa **subproses yang lebih rinci**, sehingga alur kerja sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur. Berikut disajikan **diagram dekomposisi Sistem Informasi Realisasi Belanja** yang diusulkan pada **Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat** :



Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan aliran data yang diproses di dalam sistem. Dengan adanya *Data Flow Diagram*, proses perancangan dan penulisan program dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Berikut disajikan *Data Flow Diagram* Sistem Informasi Realisasi Belanja yang diusulkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat :

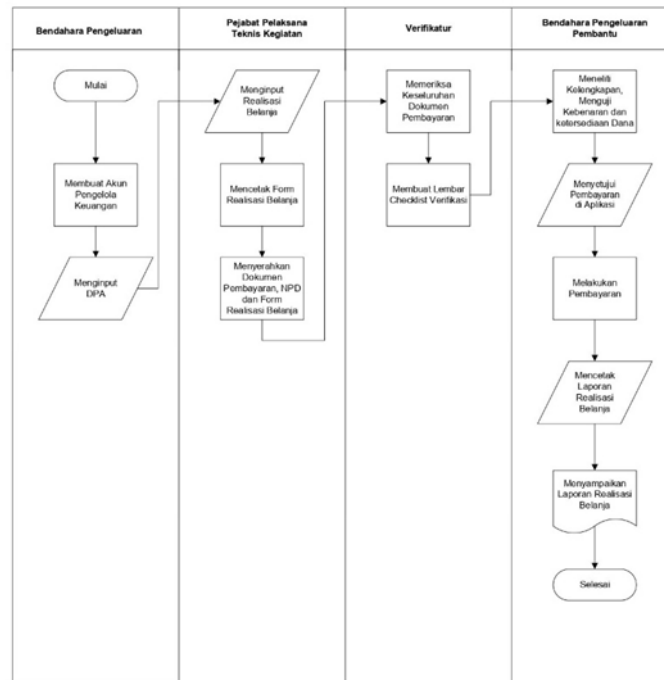


Gambar 3 Data Flow Diagram Usulan
Sumber : Sistem Usulan (Penulis)

Diagram Hubungan Entitas Sistem Usulan Model Proses Bisnis (Flowchart)

Berdasarkan hasil analisis dan prosedur Sistem Informasi Realisasi Belanja yang diusulkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, berikut disajikan model proses bisnis berupa *flowchart* yang diusulkan oleh penulis. Model ini menggambarkan alur proses sistem secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran sebagai Admin membuat dan mengelola data pengguna (user) yang kemudian disimpan ke dalam basis data pengguna.
2. Bagian Admin mengunggah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke dalam sistem.
3. PPTK melakukan penginputan rencana realisasi belanja ke dalam sistem dengan tahapan sebagai berikut Menginput data Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun Belanja, Kelompok Belanja / Tagging, Keterangan Belanja atau Aktivitas, nominal rencana realisasi belanja, uraian tujuan pembayaran.
4. PPTK mencetak Formulir Realisasi Belanja.
5. PPTK Menyerahkan Dokumen Pembayaran, NPD dan Formulir Realisasi Belanja.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap berkas Formulir Realisasi Belanja yang diajukan oleh PPTK dengan membandingkan data pada sistem dengan dokumen pendukung yang disertakan. Apabila data yang diajukan telah sesuai, Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan persetujuan dengan memilih menu Disetujui pada sistem. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menolak pengajuan dengan memilih menu Ditolak.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Melakukan Pembayaran.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Mencetak Laporan Realisasi Belanja
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu Menyampaikan Laporan Realisasi Belanja

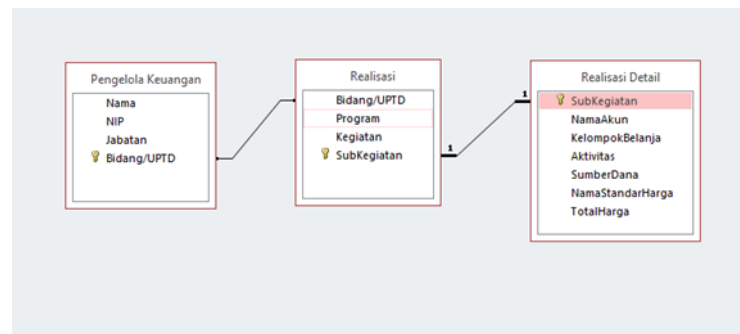


Gambar 4 Model Bisnis Flowchart Usulan

Sumber : Sistem Usulan (Penulis)

Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan gambaran yang menjelaskan keterkaitan antar data dalam basis data yang saling berhubungan melalui suatu diagram. Berikut disajikan Entity Relationship Diagram pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat :



Gambar 5 Entity Relationship Diagram Usulan

Sumber : Sistem Usulan (Penulis)

Spesifikasi Rancangan Sistem Usulan

Spesifikasi rancangan sistem usulan membahas rincian bentuk dokumen masukan dan keluaran yang diusulkan pada Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada bagian ini, penulis menjelaskan spesifikasi rancangan sistem usulan berupa uraian perancangan dan pembuatan aplikasi yang akan digunakan, yang meliputi antara lain :

Bentuk Dokumen Masukan

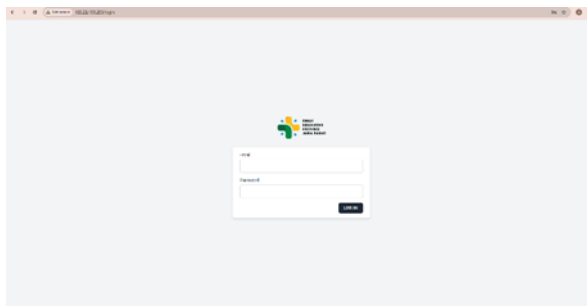
Dokumen masukan yang digunakan pada sistem usulan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Form Permintaan Pengguna (User)
Nama Dokumen : Form Permintaan Pengguna
Fungsi : Mencatat dan menginformasikan permintaan pembuatan akun pengguna sistem
Tujuan : Admin (Bendahara Pengeluaran)
2. Form Input Anggaran (DPA)
Nama Dokumen: Form Data Anggaran
Fungsi : Menginput data anggaran awal dan perubahan sesuai dengan DPA
Tujuan : Admin (Bendahara Pengeluaran)
3. Form Input Realisasi Belanja
Nama Dokumen : Form Realisasi Belanja
Fungsi : Mencatat data rincian realisasi belanja
Tujuan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4. Form Verifikasi Realisasi Belanja
Nama Dokumen : Form Verifikasi Realisasi Belanja
Fungsi : melakukan pengecekan dan persetujuan data realisasi belanja yang telah diinput
Tujuan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

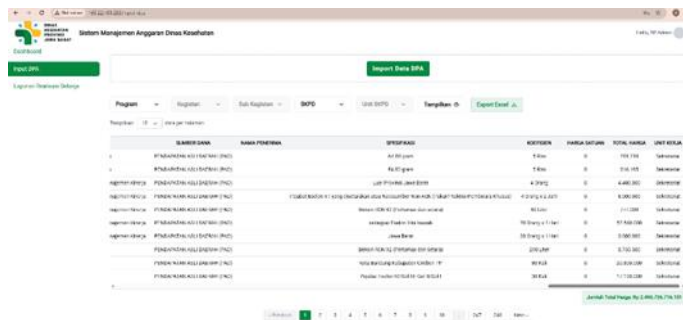
Bentuk Dokumen Keluaran

Dokumen keluaran yang digunakan pada sistem usulan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Informasi Login

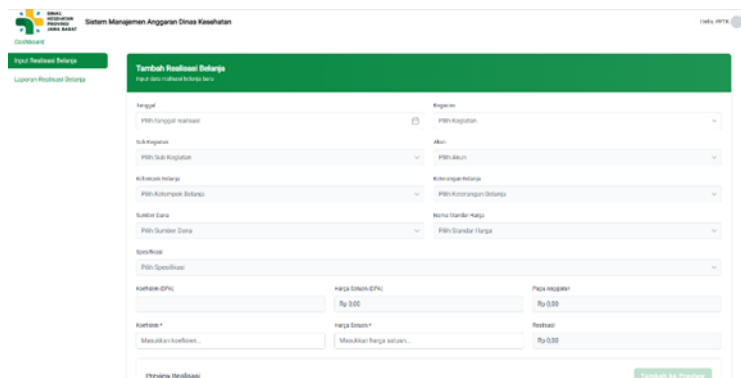


2. Menu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



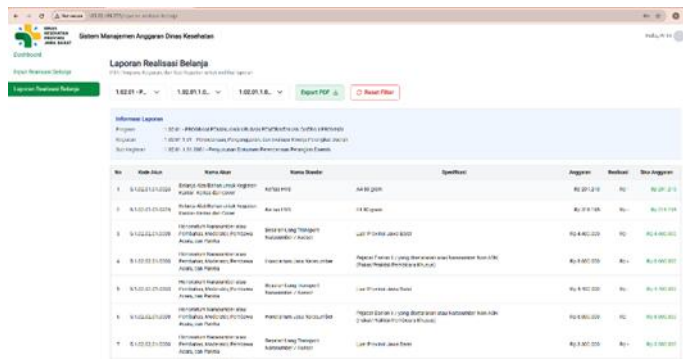
The screenshot shows the 'Sistem Manajemen Anggaran Dinas Kesehatan' dashboard. It features a sidebar with 'Dashboard', 'Input Realisasi Belanja', and 'Laporan Realisasi Belanja'. The main area displays a table of budget items with columns: No, Kode Akun, Nama Penerimaan, Nama Pengeluaran, Spesifikasi, Kebutuhan, Jumlah Setoran, Total Realisasi, and Unit KESJA. The table lists various budget items with their respective codes, names, and values.

3. Menu Input Realisasi Belanja



The screenshot shows the 'Tambah Realisasi Belanja' form. It includes a sidebar with 'Dashboard', 'Input Realisasi Belanja', and 'Laporan Realisasi Belanja'. The main area contains a form with fields for 'Kategori', 'Sub Kategori', 'Kategori Belanja', 'Sub Kategori Belanja', 'Kategori Dana', 'Sub Kategori Dana', 'Kategori Realisasi', 'Sub Kategori Realisasi', 'Kategori Belanja', 'Sub Kategori Belanja', 'Kategori Dana', 'Sub Kategori Dana', 'Kategori Realisasi', 'Sub Kategori Realisasi', 'Kategori Belanja', 'Sub Kategori Belanja', 'Kategori Dana', 'Sub Kategori Dana', 'Kategori Realisasi', 'Sub Kategori Realisasi'. The form also includes a 'Preview Realisasi' button.

4. Menu Cetak Laporan



The screenshot shows the 'Laporan Realisasi Belanja' report. It includes a sidebar with 'Dashboard', 'Input Realisasi Belanja', and 'Laporan Realisasi Belanja'. The main area displays a table of budget items with columns: No, Kode Akun, Nama Penerimaan, Nama Pengeluaran, Spesifikasi, Anggaran, Realisasi, and Sisa Anggaran. The table lists various budget items with their respective codes, names, and values.

Normalisasi Database

Struktur Kode

Berikut struktur kode dalam sistem informasi realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

```

resources > js > Pages > Auth > @ Login.jsx ...
10 export default function Login({ status }: { status?: string }) {
11   const { data, setData, post, processing, errors, reset } = useForm({
12     email: '',
13     password: '',
14     remember: false as boolean,
15   });
16
17   const submit: FormEventHandler = (e) => {
18     e.preventDefault();
19
20     post('/route/login', {
21       onSuccess: () => reset('password'),
22     });
23   };
24
25   return (
26     <GuestLayout>
27       <Head title="Log in" />
28
29       (status && {
30         <div className="mb-4 text-sm font-medium text-green-600">
31           {status}
32         </div>
33       ))
34
35       <form onSubmit={submit}>
36         <div>
37           <InputLabel htmlFor="email" value="Email" />
38
39           <TextInput
40             id="email"
41             type="email"
42             name="email"
43             value={data.email}
44             className="mt-1 block w-full"

```

```

Register.jsx
resources > ja > Pages > Auth > Register.jsx > ...
14 export default function Register({ roles }: { roles: Role[] }) {
15   const { data, setData, post, processing, errors, reset } = useForm({
16     name: '',
17     email: '',
18     password: '',
19     password_confirmation: '',
20     role: '',
21   });
22   const submit: FormEventHandler = (e) => {
23     e.preventDefault();
24     post(route('register'), {
25       onFinish: () => reset('password', 'password_confirmation'),
26     });
27   };
28   return (
29     <GuestLayout>
30       <Head title="Register" />
31       <form onSubmit={submit}>
32         <div>
33           <InputLabel htmlFor="name" value="Name" />
34           <TextInput
35             id="name"
36             name="name"
37             value={data.name}
38             className="mt-1 block w-full"
39             autoComplete="name"
40             isFocused={true}
41             onChange={(e) => setData('name', e.target.value)}
42             required
43           />
44         </div>
45       </form>
46     </GuestLayout>
47   );
48 }

```

```

Show.jsx
resources > ja > Pages > RealisasiBelanja > Show.jsx > ...
11 export default function Show({ realisasiBelanja }: Props) {
12   return (
13     <ParentLayout>
14       <Head title="Detail Realisasi Belanja - {realisasiBelanja.id}" />
15       <div className="max-auto max-w-4xl p-6">
16         <div className="rounded-lg border border-gray-100 bg-white shadow-md">
17           <div className="flex items-center justify-between">
18             <div>
19               <h2 className="text-xl font-sans text-white">
20                 Detail Realisasi Belanja
21               </h2>
22               <p className="text-sm text-white/90">
23                 ID: {realisasiBelanja.id} | Tanggal: {
24                   realisasiBelanja.tanggal,
25                   .toLocaleDateString('id-ID')}
26               </p>
27             </div>
28             <div className="flex space-x-2">
29               <Link
30                 href="/realisasi-belanja/{realisasiBelanja.id}/edit"
31                 className="rounded-lg border border-white/30 bg-white/10 px-4 py-2 font-medium text-white"
32               >
33                 Edit
34               </Link>
35               <Link
36                 href="/realisasi-belanja/{realisasiBelanja.id}"
37                 className="rounded-lg border border-white/40 bg-white/20 px-4 py-2 font-medium text-white"
38               >
39                 Kembali
40               </Link>
41             </div>
42           </div>
43         </div>
44       </div>
45     </ParentLayout>
46   );
47 }

```

Spesifikasi Sistem Komputer

Perancangan sistem informasi memerlukan analisis kebutuhan yang tepat guna menunjang pengembangan sistem informasi yang efektif dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebutuhan sistem yang mencakup kebutuhan perangkat keras (hardware) dan kebutuhan perangkat lunak (software) agar sistem yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang akan digunakan untuk merancang sistem informasi akuntansi pembelian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Perangkat Keras yang Dibutuhkan

Hardware	Spesifikasi
Processor	AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics
RAM	4 GB
Hardisk	238 GB

Sumber : Sistem Usulan (Penulis)

Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang sistem informasi realisasi belanja yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Perangkat Lunak yang Dibutuhkan

Perangkat Lunak	Versi
Visual Studio Code	1.109.0
MAMP	7.2
Browser Google	Browser Google Chrome Version 144.0.7559.110

Sumber : Sistem Usulan (Penulis)

Konfigurasi Sistem Komputer

Konfigurasi sistem komputer merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan menghasilkan data dalam bentuk informasi. Konfigurasi sistem yang tepat diperlukan agar sistem informasi dapat berjalan secara efektif dan mendukung kebutuhan pengguna. Berdasarkan kondisi pada Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja yang melibatkan beberapa bagian, diperlukan dukungan jaringan teknologi informasi yang terintegrasi. Sistem ini digunakan oleh empat bagian, yaitu Admin (Bendahara Pengeluaran), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Masing-masing bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Admin bertugas untuk membuat akun pengguna serta mengunggah data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). PPTK bertanggungjawab melakukan input data realisasi belanja. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan proses verifikasi dan persetujuan terhadap data realisasi belanja yang telah di input. Sementara itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berperan dalam melakukan monitoring terhadap laporan realisasi anggaran yang dihasilkan oleh sistem.

KESIMPULAN

Pada akhir penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa **perancangan Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja** yang diusulkan dapat diimplementasikan untuk mendukung proses pengelolaan dan pelaporan realisasi anggaran. Sistem ini dirancang sebagai **aplikasi berbasis web** dengan menggunakan pendekatan **System Development Life Cycle (SDLC)** dan metode **Agile**. Penerapan sistem ini diharapkan mampu **meminimalisir permasalahan** yang selama ini terjadi, seperti proses pencatatan realisasi belanja yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan penyusunan laporan, ketidaksesuaian data antara kartu kendali, SIPD, dan rekening koran, serta keterbatasan informasi laporan hingga ke tingkat rincian dan komponen belanja. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, proses monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dapat dilakukan secara **lebih efektif, transparan, dan akurat**. Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja yang dirancang diharapkan dapat **memudahkan pegawai** dalam melakukan pencatatan dan pelaporan realisasi belanja, serta menghasilkan **informasi realisasi anggaran yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan**,

sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial di lingkungan **Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2023). *Peran Camat Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Agma, A. R. (2025). Pengaruh Big Data terhadap Manajemen Risiko dan Keputusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 28–37.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 2(2), 39–46.
- Darmansyah, T., Fadhillah, R. N. T., Siregar, S. A., Pane, T. I. L., & Siagian, I. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Bendahara Umum Di Dinas Koperasi Dan UMKM Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Keuangan Administrasi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1971–1975.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Kusumaningrum, Y. G. I., Niha, S. S., & Manafe, H. A. (2024). Kinerja Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Proses Penatausahaan Keuangan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Kupang. *Perspektif Akuntansi*, 7(2), 187–209.
- Ma'sum, A., Purwanto, H., & Nugraha, R. W. (2025). Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital terhadap Pengambilan Keputusan di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 816–825.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Najoan, V. F., Budiarmo, N. S., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penerapan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 644–654.
- Prastowo, Y., & Saputro, J. A. (2025). *Akuntansi Sektor Publik 5.0: Transformasi Digital Menuju Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel*. Penerbit Andi.
- Purwono, A. Y. (2025). Implementasi Artificial Intelligence pada Praktik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5160–5169.
- Ramadhany, R., Rustiyana, R., Rianty, E., Baskoro, S. E., Hardini, I. R., & Anitasari, M. (2025). *Transformasi Digital Sektor Publik*. Star Digital Publishing,.
- Samosir, F. R. N., Badaruddin, B., & Siregar, N. S. S. (2022). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. *PERSPEKTIF*, 11(1), 272–285.
- Segara, K. G., & Nasution, M. I. P. (2025). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 21–33.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7 (4), 193–208.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.

- Simbolon, S. (2022). Peran Bendahara Pengeluaran Pada Pengelolaan Keuangan:(Studi Kasus Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 110–114.
- Siregar, S. M. D. (2025). Peran Bendahara Pengeluaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Melalui Sistem Aplikasi Keuangan Pada Pengadilan Negeri Bangil. *Rashid: Journal of Economic*, 1(1), 38–46.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Syahfina, L., & Nasution, M. I. P. (2025). Peran sistem informasi manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan di lingkungan organisasi modern. *International, Journal of Sharia Business Management*, 4(6), 541–549.
- Wahyiah, I. R. (2025). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa: Upaya menuju smart village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832–849.
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3).